



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LKj PEJABAT

TRI BULAN III

TAHUN

2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRI BULAN III Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Sekretaris** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2021** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Sekretaris**.

Sekretaris merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang **Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang **Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Bappeda berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Sekretaris** mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat Bappeda terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada **Tahun 2021**.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian **Kinerja Tahun 2021** yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan **9** (sembilan) Sasaran dan **9** (sembilan) Indikator Kinerja dan **1 (satu)** program dengan **8 (delapan)** kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

**PERJAJIAN KINERJA SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
4	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%
5	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100%
6	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
7	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%

8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%
9	Meningkatnya kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol	Persentase fasilitasi perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.143.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.294.443.682
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.041.750
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.295.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.746.640
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.656.410
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.938.500
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.155.000
	Jumlah	3.255.419.982,

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun **2021 TRI BULAN III** :

ITabel 2.1

Capaian Kinerja **TRI BULAN III** Sekretariat Bappeda **2021**

N O	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tar get	Reali sasi	Capai an	Ket.
1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	90 %	90 %	
2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	
3	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	90 %	90 %	
4	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %	90 %	90 %	
5	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	70 %	70 %	
6	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	25 %	25 %	

7	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	90 %	90 %	
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	100 %	100 %	
9	Meningkatnya kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol	Persentase fasilitasi perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol	100 %	100 %	100 %	

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang setelah **pergeseran dan refocusing** khususnya di lingkup Sekretariat dengan pagu anggaran **Rp. 4.399.397394,-** dengan adanya **Refocusing tersebut maka** pagu anggaran sampai dengan Tri Bulan III **Rp. 3.255.419.982 ,-** dengan Realisasi sebesar **Rp 2.949.688.837 ,--** atau sebesar **90.61 %** secara detil penyerapan anggaran tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut

2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan III , Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran awal	Pagu anggaran smpai Tri Bulan III	Realisasi	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4.722.868.034	3.255.419.982	2.949.688.837	90,61	100	100	100	0
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	14.039.000,-	8.143.000	8.056.000	98,93	100	100	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.996.818.422,-	2.294.443.682	2.268.031.969	98,85	100	100	100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi BMD Perangkat Daerah	2.499.750,-	1.041.750	1.031.750	99,04	100	90	90	9
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi Kepegawaian PD	334.255.000,-	49.295.000	46.797.000	94,93	100	100	100	

Lanjutan

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran awal	Pagu anggaran smpai Tri Bulan III	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	440.491.560,-	225.746.640	216.466.485	95,89	100	100	100	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	258.841.770,-	257.656.410	58.460.000	22,69	100	50	50	78
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	472.117.892,-	354.938.500	312.206.933	87,96	100	100	100	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	204.990.000,-	64.155.000	38.638.700	60,23	100	80	80	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya Konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Organisasi melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan. Terhadap capaian atas target kinerja **belum mencapai** angka 100% sesuai realisasi anggaran di Sekretariat karena masih **tribulan tiga** Tahun **Anggaran 2021**.

Selanjutnya **capaian kinerja** dari masing-masing indikator kinerja tersebut belum mencapai **100 %** karena adanya beberapa kegiatan yang masih proses **pengajuan juga terkait kondisi PPKM** sehingga berpengaruh terhadap Pengadaan Barang karena perbedaan harga yang ada di RKA dengan realisasi di Lapangan lebih mahal dan **terlambatnya** pelaksana kegiatan tugas (sdm) yang belum memahami secara optimal diantaranya dalam menyampaikan kelengkapan SPJ sehingga berpengaruh terhadap pengajuan Uang persediaan karena **belum tercapainya 70 %** dari pengajuan UP , koordinasi antar bidang yang belum maksimal dan terlambatnya penyampaian informasi terkait kebijakan anggaran .

Langkah-langkah yang diupayakan dalam mewujudkan keberhasilan yang dilakukan adalah secara intens melakukan **koordinasi** kepada para PPTK dan PPK juga pelaksana Administrasinya di masing masing Bidang .

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN.	PAGU ANGGARAN.	REALISASI	%
			S/D TRI BULAN III		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.138.754.034,00	3.255.419.982,00	2.949.688.837,00	90,61
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	11.655.000	8.143.000	8.056.000	98,93
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.972.299.922	2.294.443.682	2.268.031.969	98,85
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.041.750	1.041.750	1.031.750	99,04
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.295.000	49.295.000	46.797.000	94,93
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.296.560	225.746.640	216.466.485	95,89
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.656.410,00	257.656.410,00	58.460.000,00	22,69
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.769.392	354.938.500	312.206.933	87,96
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.740.000	64.155.000	38.638.700	60,23

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Sub Bagian dalam rangka Pencapaian target Realisasasi yang harus sesuai dengan Timeschedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III dan IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporkurangbaik
 - Laporsudahbaik
 - Lapordiperbaiki
 - Target danrealisasiditelitiulang
 - Capaianditelitiulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari **1 Program** dengan **8 (delapan)** kegiatan yang ditetapkan, **9 (sembilan)** Sasaran dan **9 (sembilan)** Indikator Kinerja, dimana target tersebut belum 100 % **berhasil diwujudkan** dengan optimal karena masih pada **Tri Bulan III** disebabkan ada kegiatan yang ***masih proses pengajuan***

Lumajang, 30 September 2021

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

SEKRETARIS BAPPEDA



ENIK KUSTANING ROHMI, SH. MM
NIP. 19631220 198903 2 003

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada tri bulan pertama ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawian fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan terkait kepegawian
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,

- pengadaan, perawatan serta pengamanan perlengkapan dan asset.
- f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai peran penting dalam penyusunan Rencana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 6 (enam) Target Kinerja dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yaitu terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda.

TABEL
PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
2	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %
3	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %
4	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %
5	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2019

No	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (9 –6)
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	1.041.750						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	1.041.750	1.031.750	99,04 %	2 fas	1 fas	50	1.21
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	213.871.000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	41.000.000	40.865.000	99,67 %	2 jenis	2 jenis	100 %	0.33
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	6.630.000	4.800.000	72,4 %	34 peserta	1 peserta	2,94 %	0.42
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundang-undangan	164.576.000	0	0	27 peserta	3 peserta	11,1 %	11.0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	1.665.000	1.132.000	67,99 %	18 peserta	0	0	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	230.296.560	80.649.505	55 %				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	1.498.640	686.000	45,77 %	2 jenis	2 jenis	20 %	0.98
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah jenis logistic kantor yang disediakan	58.646.020	50.017.380	85,29 %	4 jenis	4 jenis	80 %	3.65
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah fasilitas penggandaan dokumen Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	29.387.500	28.000.375	95,66 %	1 fas 5 jenis	1 fas 5 jenis	10 %	1.82
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	1.800.000	910.000	50,56 %	2 ekp	2 ekp	30 %	1.94
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	2.700.000	2.700.000	100%	2 fas	2 fas	0	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah fasilitas rakor SKPD	136.264.400	134.041.730	98,37 %	2 fas 1 fas	2 fas 1 fas	10 %	0.5
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	258.841.770						

	Penggandaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	257.656.410	58.460.000	22,69 %	5 jenis	3 jenis	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	472.117.892						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	3.420.000	2.388.840	69,85 %	4 jenis	4 jenis	7 %	0.02
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening yang di bayar	150.701.392	80.706.781	53,55 %	3 jenis	3 jenis	33 %	5.02
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	312.648.000	299.000.312	73,28 %	4 jenis	4 jenis	25 %	0.77
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	204.990.000						
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara	77.340.000	33.278.700	43,03 %	25 unit	4 unit	16 %	2.48
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	72.400.000	5.360.000	7,4 %	90 unit	1 unit	1.30 %	0.01
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	55.250.000	0	0	1 jenis	0	0	0

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	43 %	41,27 %
Terwujudnya Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawian PD	100 %	91 %	12,92 %
Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	55 %	19,31 %
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100 %	0	0
Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	92 %	25,11 %

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100 %	51 %	5.10 %

Permasalahan dan hambatan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

- a. Adanya refofusing anggaran tahun 2021
- b. Sebagian Sub Kegiatan mengacu pada time scedule

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawian dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 6 target sasaran stratejik yang ditetapkan, masih belum 100% berhasil diwujudkan dengan optimal karena pada Tri Bulan III disebabkan ada kegiatan yang masih proses pengajuan.

Lumajang, September 2021

Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM
Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003

HARDINA MEIDIASTUTI, SE.
Penata
NIP. 19790526 201101 2 005

Lumajang, 12 April 2021

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH



ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM

Pembina

NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



HARDINA MEIDIASTUTI, SE.

Penata

NIP. 19790526 201101 2 005

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggung jawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Keuangan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Keuangan merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Sub Bagian Keuangan tugas:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai bahan evaluasi;

Sub Bagian Keuangan mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 4 (empat) Target Kinerja dengan 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

TABEL
PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27 orang
2	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksana tugas ASN	4 jenis pelayanan
3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 jenis dokumen
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan	3 jenis

KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	2.898.430.322
2	Penyediaan Administrasi	Rp.	72.388.600
3	Pelaksana tugas ASN Koordinasi dan penyusunan	Rp.	1.481.000
4	laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD	Rp.	-
Jumlah Total		Rp.	<u>2.972.299.922</u>

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan

SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	27	27	100%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksana tugas ASN	4	4	100%
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD`	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	1	1	100%
Terlaksananya koordinasi dan	Jumlah jenis laporan keuangan	3	3	100%

SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD				

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Keuangan Tahun 2021

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Tar get	Reali sasi	Capai an	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	2.898.430.322	2.215.166.619	99.19 %	27	27	100%	18.004.613
		Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksana tugas ASN	72.388.600	51.384.350	85.94 %	4	4	100%	8.407.100
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	1.481.000	1.481.000	100%	1	1	100%	-
		Jumlah jenis laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Keuangan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.898.430.322	2.215.166.619	99.19%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	72.388.600	51.384.350	85.94%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD`	1.481.000	1.481.000	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	-	-	-

Adapun kendala dan hambatan dari kinerja terdapat pada:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan pengadministrasian keuangan perangkat daerah sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD tidak ada pagu anggaran dikarenakan refofusing

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi LKj PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 4 target sasaran stratejik yang ditetapkan, target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakterhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Belum terintegritas aplikasi dengan yang lain
 - b. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA


ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM.
Pembina
NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG KEUANGAN


ERNI MARTINGASIH
Penata Muda Tk. I
NIP. 1910305 199403 2 003

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Penyusunan Program terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Penyusunan Program. Sub Bagian Penyusunan Program merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 dan telah diubah menjadi Peraturan (apabila ada perubahan) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program fungsi:

- a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;

- f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/ kegiatan Bappeda;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- h. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- i. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 5 (lima) target kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis yaitu sesuai dengan Perjanjian Kinerja

TABEL
PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	7 Jenis Dokumen
2	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Jenis Dokumen
3	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	10 jenis Dokumen
4	Tercapainya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi
		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 Jenis

Sub. Kegiatan		Anggaran	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeah	Rp.	1.499.750
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	5.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	5.539.250
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	1.500.000
Jumlah			14.039.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	7 Jenis Dokumen	7 Jns Dok	100%	
Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Jenis Dokumen	1 Jns Dok	33%	
Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	10 jenis Dokumen	7 Jns Dok	70%	
Tercapainya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi	0	0%	
	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 Jenis	1 Jns Dok	100%	

Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan Program Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran							
	Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	14.039.000	8.056.000	57,38%	100%	72,73 %	0,,73 %	15,35%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun	1.499.750	1.481.000	98,74%	7 Jns Dok	7 Jns Dok	100	1,26%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5.500.000	1.905.000	34,64%	3 Jns Dok	1 Jns Dok	33,33	0,1%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	5.539.250	3.941.000	71,14%	10 Jns Dok	7 Jns Dok	70%	1,14%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1.500.000	729.000	48,60%	1 Fas			51,40%
		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD				1 Jns Dok	1 Jns Dok	100%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Penyusunan Program dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana di dalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.039.000	8.056.000	57,38%
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeah	1.499.750	1.481.000	98,74%
		b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.500.000	1.905.000	34,64%
		c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.539.250	3.941.000	71,14%
		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	729.000	48,60%

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah :

- a. Adanya kegiatan yang Pergeseran I, Pergeseran II, Pergeseran III, rekopusing dan Perubahan anggaran yang masih belum selesai, sehingga sampai pada saat ini masih belum dilaksanakan karena adanya sistem yang belum berubah sehingga menunggu Perubahan Anggaran kegiatan (sistem pada SIPD).
- b. Untuk kegiatan yang belum mencapai 100% karena menyesuaikan dengan Time Schedule

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Relaisasi sesuai dengan Time Schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran., agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 4 target sasaran strategis yang ditetapkan, 5 (lima) target kinerja sudah berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Belum Optimalnya sinergitas sistem aplikasi yang ada
 - b. Masih terdapat perubahan peraturan-peraturan dari Kementerian
 - c. Belum sepenuhnya menguasai peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi jumlah SKPD yang berpredikat A.

Lumajang, 12 Oktober 2021

SEKRETARIS BAPPEDA



ENIK KUSTANING ROHMI, SH, MM
NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG SUNGRAM



SUKARDI, S, AP.
Penata Tingkat I
NIP. 1967199403 1 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
4. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
5. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana kerja Bappeda;
2. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;

4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
6. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
9. pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bappeda dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Presentase Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	100 %
2	Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kajian Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100 %
3	Terfasilitasinya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase kegiatan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	100 %
4	Tersusunnya perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen
5	Terumuskannya kebijakan teknis penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penelitian dan pengembangan	1 dokumen
6	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	7 kegiatan
7	Terfasilitasinya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	7 keg. litbang
8	Terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah	1 fasilitasi
9	Terlaksananya tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan	Jumlah dokumen tugas tugas lain	1 dokumen

	Kegiatan		Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Rp	483.136.500
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	583.292.175
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	94.500.000
	Jumlah	Rp	

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2021.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Presentase Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	100 %	0	0%	
2	Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kajian Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	0	0%	
3	Terfasilitasinya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase kegiatan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	100 %	0	0%	
4	Tersusunnya perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	0	0%	
5	Terumuskannya kebijakan teknis penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penelitian dan pengembangan	1 dokumen	0	0%	
6	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	7 kegiatan	0	0%	
7	Terfasilitasinya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	7 keg. litbang	0	0%	
8	Terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah Fasilitas pelaksanaan inovasi daerah	1 fasilitas	0	0%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
9	Terlaksananya tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan	Jumlah dokumen tugas tugas lain	1 dokumen	0	0%	

Tabel 3
Realisasi Program Kegiatan
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sampai Tribulan 3 Tahun 2021

No	kegiatan	Rp.	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian	Keterangan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Rp	483.136.500	2.100.000	481.036.500	0,4 %	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	583.292.175	1.125.000	582.167.175	0,2 %	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	94.500.000	0	94.500.000	0%	
	Jumlah	Rp	1.160.928.675	3.225.000	1.157.703.675	0,28%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan

Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan. Ada 2 sub kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek sosial dan sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata

Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek sosial terdiri dari penyusunan 2 kajian, yaitu Penyusunan Analisis Indeks Kemiskinan dan Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs. Kemudian untuk sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata terdiri dari 1 penyusunan kajian yaitu studi kelayakan Pengembangan Gunung Wayang.

Kajian Penyusunan Analisis Indeks Kemiskinan termasuk kegiatan yang masuk self blocking, jadi prosesnya tidak diteruskan, sedangkan Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs sudah melakukan desk dengan

OPD untuk menggali data capaian SDGs Kabupaten Lumajang. Data capaian SDGs Kabupaten Lumajang ini perlu dilakukan desk beberapa kali untuk memastikan data capaian yang di kirimkan oleh OPD Valid. Selain ini juga untuk evaluasi capaian yang belum ada datanya di Kabupaten Lumajang.

Penyusunan studi kelayakan pengembangan gunung wayang sudah di laksanakan, dan laporan akhir sudah selesai tapi belum melaksanakan penyampaian laporan akhir di hadapan perangkat daerah. Realisasi anggaran baru sebesar 0,4% merupakan biaya mengadakan rapat koordinasi awal, sedangkan biaya kajian akan di cairkan pada tibusan ke 3.

2. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Terdapat 4 sub kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini diantaranya sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan ; sub kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Pangan; sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian; serta sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, seyogyanya dilakukan penyusunan kajian dengan judul Analisis Tingkat Daya Beli Masyarakat, namun dikarenakan terkena self blocking maka kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan. Untuk sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama LP2M Universitas Jember, dan SPMK di buat pada tanggal 1 Juli – 28 Oktober 2021 selama 120 hari, sehingga bisa segera melaksanakan kegiatan pengkajian potensi organik di Kabupaten Lumajang.

Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian berupa Kajian Kerentanan Mata Air akan dialihkan kegiatannya pada PAK APBD 2021. Dan untuk sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Argosari sudah di keluarkan SPMK di tanggal 23 Juni 2021 dengan masa penelitian 120 hari sampai 20 oktober 2021. Penyampaian laporan pendahuluan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2021, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Penyampaian laporan antara pada bulan September 2021 dan lapkir pada Oktober 2021.

Realiasi anggaran masih terbatas pada belanja makan minum rapat koordinasi yang melibatkan OPD. Belum ada pencairan LS kajian

3. Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada tribulan ke 3 melakukan pendampingan pengisian kuesioner kuesioner IDSD (Indeks Daya Saing Daerah), KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dan IID/IGA (Indeks Inovasi Daerah/Innovative Government Award). Terdapat 8 inovasi dari perangkat daerah yang mengikuti KIPP, tapi hanya 4 inovasi yang lolos tahap 1. Sedangkan 4 inovasi lagi tidak lolos administrasi karena tidak memenuhi syarat 2 tahun pelaksanaan inovasi.

Komponen IDSD 2021 terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 97 indikator yang satu kesatuan sistem yang membentuk daya saing daerah secara keseluruhan. Indikator membentuk nilai komposit Dimensi. Dimensi membentuk nilai komposit Pilar. Pilar membentuk nilai komposit Faktor/Aspek utama. Faktor membentuk nilai komposit IDSD Kabupaten/Kota. Nilai IDSD Kabupaten Lumajang adalah **1,83**. Nilai tersebut masuk kedalam kategori sedang. Hasil nilai tersebut naik dari tahun 2020 yang nilainya 0.00 karena di tahun 2020 Kabupaten Lumajang tidak mengikuti pengukuran IDSD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

1. Minggu ke 2-3 November 2021 pengajuan LS Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs dan Penyusunan studi kelayakan pengembangan gunung wayang.
2. Minggu 1 Oktober sampai minggu IV November akan dilaksanakan evaluasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh provinsi dan pusat.
3. Minggu 1-1V Desember 2021 persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
4. Minggu 3 s/d 4 Oktober 2021, akan dilaksanakan penyampaian laporan akhir kajian pemetaan potensi organik yang bekerjasama dengan LP2M Universitas Jember untuk melaksanakan dan penyusunan studi kelayakan pemetaan Kawasan Argosari.
5. Minggu ke 2 s/d 3 November 2021 pelaksanaan akan dilaksanakan pengajuan pembayaran termin kajian pemetaan potensi organik dan penyusunan studi kelayakan pemetaan Kawasan Argosari

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan 3 Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

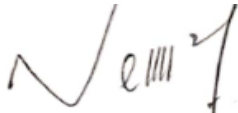
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang penelitian dan pengembangan telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan 3 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan realisasi anggaran 0,28 %.

Lumajang, 2021

Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001


VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT.
NIP. 19860620 200903 1 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
6. menyiapkan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dokumen
2	Tersusunnya bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen
3	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen
4	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen
5	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah kajian di bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen
6	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen
7	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dokumen

Sub. Kegiatan		Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp 103.863.900
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp 132.928.275
3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp 105.000.000
4	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp 241.500.000
Jumlah		Rp 583.292.175

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2021.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang ekonomi, sumber daya alam, LH, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dok	0	0%	
2	Tersusunnya bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, LH, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok	0	0%	
3	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok	0	0%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
4	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok	0	0%	
5	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah kajian di bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	0	0%	
6	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dok	0	0%	
7	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dok	0	0%	

Tabel 3
Realisasi Program Kegiatan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
Sampai Triwulan 3 Tahun 2021

No	Sub kegiatan	Rp.	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian	Keterangan
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp	103.863.900	1.125.000	102.738.900	1,1 %	
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp	132.928.275	0	132.928.275	0%	
3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp	105.000.000	0	105.000.000	0%	
4	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp	241.500.000	0	241.500.000	0%	
	Jumlah	Rp	583.292.175	1.125.000	582.167.175	0,2 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Sub bidang . Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, melaksanakan 4 sub kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kajian Analisis Tingkat Daya Beli Masyarakat pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan terkena self blocking sehingga tidak jadi dilaksanakan. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan

Pangan sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan LP2M Universitas Jember, dengan waktu penyusunan selama 120 hari, sehingga bisa segera melaksanakan kegiatan pengkajian potensi organik di Kabupaten Lumajang.

Kajian Kerentanan Mata Air pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian akan dilakukan PAK, sehingga kemungkinan tidak dilaksanakan dan pagu anggaran dialihkan kepada kegiatan lain pada bidang lain. Kemudian untuk kajian Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Argosari pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan sudah terdapat SPMK di tanggal 23 Juni 2021 dengan masa penelitian 120 hari sampai 20 oktober 2021.

Penyampaian laporan pendahuluan di di laksanakan pada pertengahan Juli 2021, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Penyampaian laporan antara pada bulan September 2021 dan laporan Akhir pada Oktober 2021. Realiasi anggaran masih terbatas pada belanja makan minum rapat koordinasi yang melibatkan OPD dan belum ada proses pencairan LS kajian.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

1. Minggu 3 s/d 4 Oktober 2021, akan dilaksanakan penyampaian laporan akhir kajian pemetaan potensi organik yang bekerjasama dengan LP2M Universitas Jember untuk melaksanakan dan penyusunan studi kelayakan pemetaan Kawasan Argosari.
2. Minggu ke 2 s/d 3 November 2021 pelaksanaan akan dilaksakan pengajuan pembayaran termin kajian pemetaan potensi organik dan penyusunan studi kelayakan pemetaan Kawasan Argosari

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan 3 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan realisasi anggaran 0,2 %.

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan



VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT.
NIP. 19860620 200903 1 002

Kasubid Litbang
Ekonomi dan Pembangunan



AL IMRON, S.Sos
NIP. 19751104 200604 1 024

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan ke 3 Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana;
6. menyiapkan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya dokumen bidang pertanian dan ketahanan pangan Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang inovasi, pengembangan teknologi, difusi inovasi, penerapan teknologi.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dokumen
2	Tersusunnya bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.	Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan	1 dokumen
3	Tersusunnya bahan penyusunan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, di bidang inovasi, pengembangan teknologi, difusi inovasi, penerapan teknologi.	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen
4	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, LH, pengembangan wilayah dan fisik dan prasarana.	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen
5	Tersusunnya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan penelitian/kajian pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	2 dokumen

Sub. Kegiatan		Anggaran	
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	94.500.000
Jumlah		Rp	94.500.000

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2021.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

No	Sasaran sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang inovasi, pengembangan teknologi, difusi inovasi, penerapan teknologi.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dokumen	0	0%	
2	Tersusunnya bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.	Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan	1 dokumen	0	0%	
3	Tersusunnya bahan penyusunan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, di bidang inovasi, pengembangan teknologi, difusi inovasi, penerapan teknologi.	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	0	0%	
4	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi, pengembangan teknologi, difusi inovasi, penerapan teknologi.	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	0	0%	
5	Tersusunnya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan penelitian/kajian pengembangan dan perencanaan bidang teknologi dan inovasi	2 dokumen	0	0%	

Tabel 3
 Realisasi Program Kegiatan
 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Sampai Tribulan ke 3 Tahun 2021

No	Sub kegiatan	Rp.	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian	Keterangan
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	94.500.000	0	94.500.000	0%	
	Jumlah	Rp	94.500.000	0	94.500.000	0%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan. Selain itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan pengembang aplikasi dashboard pembangunan SDM untuk spesifikasi teknisnya dan prototype nya. Pengembangan dashboard pengembangan SDM pada tahun 2021 masuk kegiatan yang di self blocking,

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada tribulan ke 3 melakukan pendampingan pengisian kuesioner IDSD (Indeks Daya Saing Daerah), KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dan IID/IGA (Indeks Inovasi Daerah/*Innovative Government Award*). Terdapat 8 inovasi dari perangkat daerah yang mengikuti KIPP, tapi hanya 4 inovasi yang lolos tahap 1. Sedangkan 4 inovasi lagi tidak lolos administrasi karena tidak memenuhi syarat 2 tahun pelaksanaan inovasi.

Komponen IDSD 2021 terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 97 indikator yang satu kesatuan sistem yang membentuk daya saing daerah secara keseluruhan. Indikator membentuk nilai komposit Dimensi. Dimensi membentuk nilai komposit Pilar. Pilar membentuk nilai komposit Faktor/Aspek utama. Faktor membentuk nilai komposit IDSD Kabupaten/Kota. Nilai IDSD Kabupaten Lumajang adalah **1,83**. Nilai tersebut masuk kedalam kategori sedang. Hasil nilai tersebut naik dari tahun 2020 yang nilainya 0.00 karena di tahun 2020 Kabupaten Lumajang tidak mengikuti pengukuran IDSD.

Pada tahun 2021 ini Kabupaten Lumajang mengikuti JIPP/Kovablik tahun 2021 dan ada 5 inovasi yang diikuti. Bappeda Lumajang melalui Bidang Litbang memberikan akun JIPP/Kovablik untuk diberikan kepada Inovator yang inovasinya di ikuti Kovablik 2021. Bidang Litbang memberikan sosialisasi ke inovator tentang tata cara menginput inovasi ke aplikasi JIPP/Kovablik 2021. Inovasi diupload ke aplikasi JIPP/KOVABLIK 2021 oleh masing-masing inovator dengan dibantu Bidang Litbang Bappeda Kab. Lumajang

Kabupaten Lumajang mengajukan sebanyak 52 Inovasi yang diikuti Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2021. Pada tahun 2021 hasil skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Lumajang adalah 57,50. Nilai tersebut masuk kedalam kategori Kabupaten yang Inovatif. Hasil nilai tersebut naik dari tahun 2020 yang nilainya hanya 50 atau kurang inovatif. Dalam kegiatan Inotek Award 2021 yang diselenggarakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengirimkan 22 proposal inovasi. Kabupaten Lumajang mendapatkan 2 kategori terinovatif pada 2 inovasi yaitu : Kategori I, yaitu inovasi “Gedang Mesem” dari DPKP Kabupaten Lumajang yang meraih penghargaan terinovatif VI. Kategori Inovasi Aplikasi berbasis Website/Android, yaitu “Bantu Ibu” dari Moch Bachrul W dan tim.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

1. Minggu 1 Oktober sampai minggu IV November akan dilaksanakan evaluasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh provinsi dan pusat
2. Minggu 1-1V Desember 2021 persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan 3 Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan ke 3 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun belum ada realisasi anggaran.

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan



VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT.
NIP. 19860620 200903 1 002

Plt. Kasubid Litbang
Inovasi dan Teknologi



AL IMRON, S.Sos
NIP. 19751104 200604 1 024

LAPORAN KINERJA PEJABAT
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
7. menyiapkan pengelolaan data kelitbangan;
8. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
9. melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan.

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dok
2	Tersusunnya bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok
3	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok
4	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah kajian di bidang aspek-aspek sosial	1 dok
5	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah kajian di bidang pariwisata	1 dok
6	Terlaksananya tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen fasilitasi forum CSR	1 dok

	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.	Rp	351.886.500
2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp	131.250.000
	Jumlah	Rp	483.136.500

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang Sosial dan Pemerintahan, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2021.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan 3 Tahun 2021
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan.

No	Sasaran sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan	1 dok	0	0%	
2	Tersusunnya bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok	0	0%	
3	Tersusunnya bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan,	Jumlah dokumen bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1 dok	0	0%	
4	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah kajian di bidang aspek-aspek sosial	1 dok	0	0%	
5	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah kajian di bidang pariwisata	1 dok	0	0%	
6	Terlaksananya tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan	Jumlah dokumen fasilitasi forum CSR	1 dok	0	0%	

Tabel 3
Realisasi Program Kegiatan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan
Sampai Tribulan 3 Tahun 2021

No	Sub kegiatan	Rp.	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian	Keterangan
1	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.	Rp	351.886.500	2.100.000	349.786.500	0,6 %	
2	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp	131.250.000	0	131.250.000	0%	
Jumlah		Rp	483.136.500	2.100.000	481.036.500	0,4 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan. Ada 2 sub kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek sosial, terdiri dari penyusunan 2 kajian, yaitu Penyusunan Analisis Indeks Kemiskinan dan Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs, dan sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata yang terdiri dari 1 penyusunan studi kelayakan Pengembangan Gunung Wayang.

Kajian Penyusunan Analisis Indeks Kemiskinan termasuk kegiatan yang masuk self blocking, sehingga prosesnya tidak diteruskan. Kemudian untuk kajian Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs, tahapannya sudah pada pengumpulan data serta desk dengan OPD Kabupaten Lumajang. Data capaian SDGs Kabupaten Lumajang ini perlu dilakukan desk beberapa kali untuk memastikan data capaian yang di kirimkan oleh OPD Valid. Selain ini juga untuk evaluasi capaian yang belum ada datanya di Kabupaten Lumajang. Penyusunan studi kelayakan pengembangan gunung wayang sudah dilaksanakan, dan laporan akhir sudah selesai tapi belum melaksanakan penyampaian laporan akhir di hadapan perangkat daerah.

Realisasi anggaran baru sebesar 0,4% merupakan biaya rapat koordinasi awal, sedangkan biaya kajian akan di cairkan pada tribulan ke 3 ini sesuai pengajuan terminnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

1. Pengajian LS Penyusunan Riset Evaluasi Capaian SDGs dan Penyusunan studi kelayakan pengembangan gunung wayang diperkirakan pada minggu ke 2-3 November 2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan 3 Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang penelitian dan pengembangan Sosial dan Pemerintahan telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan 3 belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan realisasi anggaran sesuai time schedule 0,4 %.

Lumajang, 2021

Mengetahui,
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan



VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT.
NIP. 19860620 200903 1 002

Kasubid Litbang
Sosial dan Pemerintahan



ABDUL AZIS, S.TP
NIP. 19731005 201406 1 001

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- c. Sub Bidang Pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SASARAN/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	85%
2	Tersusunnya Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	314.807.600
	Jumlah Total	Rp	314.807.600

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021.

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tribulan III Tahun 2021

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	85%	75%	88%
2	Tersusunnya Program Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	1 dokumen	50%

**2.2. Cost per outcome Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Tri Bulan III-Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisien
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	314.807.600	75.697.900	24,05	85%	75%	88%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 3 kegiatan pada sub bidang yang dilaksanakan pada tribulan III tahun 2021, dapat dilihat bahwa capaian anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 24,05% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp. 314.807.600,-, sedangkan kinerja sebesar 75% dari target kegiatan 85%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 88%

Capaian Kinerja Eselon 3 didukung oleh capaian kinerja eselon 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Pada sub bidang Pembangunan Manusia, koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia telah terlaksana dengan baik di tribulan III. Pada pelaksanaan kegiatan, capaian realisasi anggaran sebesar 30,70% atau sebesar Rp. 22.154.900,- dan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dari sub kegiatan yang dijadwalkan di Tribulan III. Dari capaian realisasi anggaran dan kinerja tercapai efisiensi sebesar 100 % dimana pada Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada pelaksanaannya masih pada tahap awal belum sampai akhir proses tetapi sudah dihasilkan dokumen dalam bentuk laporan sehingga capaian kinerja menjadi tinggi yaitu 100 %.
- b) Pada sub bidang Kesejahteraan Rakyat, Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Kesejahteraan Rakyat telah terlaksana dengan baik di Tribulan III. Penyerapan anggaran tercapai 80,82% dari target 80,82% yang ditetapkan di Tribulan III karena setelah perubahan anggaran, anggaran yang tersisa hanya tinggal upah tenaga kerja bulanan. Sedangkan terkait kegiatan, capaian kinerja sudah sesuai dengan target kinerja, dimana 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Rakor TKPKD dan Lokakarya SIKAT sudah terlaksana sesuai time schedule. Secara keseluruhan pada sub bidang Kesejahteraan Rakyat nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 80,82%

pada Tribulan III telah memenuhi target dari ketetapan 80,82% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.654.500,-.

- c) Pada sub bidang Pemerintahan anggaran sebesar Rp. 215.998.250,- pada tribulan III terserap sebesar 18,16%. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Pemerintahan telah terlaksana dengan baik di tribulan III. Secara keseluruhan pelaksanaan aktivitas pada sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai time schedule, belum terealisasi seluruhnya dikarenakan masih pada proses tribulan III dan akan diselesaikan pada tribulan berikutnya. Capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 66,67% atau 4 dokumen dari target 6 dokumen.
- d) Sasaran yang tidak ada anggaran yaitu tersusunnya Program Bidang Pemerintahan dengan indikator Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari target 1 dokumen sudah terealisasi 1 dokumen terkait program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk sasaran tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 2 dokumen.

Daftar Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tri Bulan III adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.824.000	8.120.000	54,78 %

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	176.174.250	23.881.500	13,56 %
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000	-	0,00%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	26.654.500	21.541.500	80,82 %
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.050.000	21.050.000	100%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	51.104.850	1.104.900	2,16%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	0,00%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	0,00%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 3 (tiga) kegiatan dalam menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan agar perencanaan yang telah dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendukung fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara maksimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan secara swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara administrasi keuangan. Sehingga target kinerja kegiatan dan target kinerja keuangan akan selesai tepat pada waktunya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan tribulan III tahun 2021.
2. Pencapaian sasaran keuangan dan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah cukup baik. Untuk capaian penyerapan keuangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 24,05% dari total anggaran sebesar Rp. 314.807.600,-, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 88% yang didukung dengan capaian kinerja dari total 8 Sub kegiatan.
3. Beberapa rencana aksi pada sub-sub kegiatan belum dilaksanakan karena masih pada tahap tribulan III dan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.

Lumajang, September 2021

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST.
NIP. 19850331 200903 1 004

LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, khususnya pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, Sub bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lumajang.

Adapun tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat
- d. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat
- e. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain lingkup kesejahteraan rakyat
- g. Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesejahteraan rakyat

- h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat
- i. Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kasubid Kesejahteraan Rakyat, antara lain :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SASARAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen
2	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
4	Tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 26.654.500
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Rp. 0

	Pembangunan Manusia		
3	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	0
Jumlah Total		Rp	26.654.500

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2021

2.1. Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Sampai Tribulan III Tahun 2021

NO.	SASARAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
2	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	-	0%
3	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	-	0%
4	Tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	-	0%

**2.2. Cost per outcome Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tri Bulan III Tahun 2021**

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Realisasi	Capaian	
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
1		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	26.654.500	21.541.500	80.82 %	5 dokumen	2 dokumen	40%	-
2		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0%	1 dokumen	0	0	
3		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0%	1 dokumen	0	0	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani secara bertahap telah dilaksanakan. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Kesejahteraan Rakyat telah terlaksana dengan baik di Tribulan III. Penyerapan anggaran tercapai 80.82% dari target 80.82% yang ditetapkan di Tribulan III karena setelah perubahan anggaran, anggaran yang tersisa hanya tinggal upah tenaga kerja bulanan. Sedangkan terkait kegiatan, capaian kinerja sudah sesuai dengan target kinerja, dimana 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Rakor TKPKD dan Lokakarya SIKAT sudah terlaksana sesuai time schedule. Secara keseluruhan pada sub bidang Kesejahteraan Rakyat nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 80.82% pada Tribulan III telah memenuhi target dari ketetapan 80.82% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.654.500

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Efisiensi pelaksanaan Fungsi dan tugas Sub bidang Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi Sub bidang Kesejahteraan Rakyat karena ada refocusing anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Tribulan III Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkungannya.
2. Serapan anggaran di Tribulan III sebesar 80.82% sudah optimal dan bisa memenuhi target kinerja karena pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di Tribulan III sudah sesuai dengan time schedule.


Lumajang, 5 Oktober 2021

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST.
NIP. 19850331 200903 1 004

KASUBID KESEJAHTERAAN RAKYAT


AHMAD MUIZUL MAHSUS, S.Sos.
NIP. 19770506 200604 1 026

**LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas bagian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Pemerintahan.

Tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah membantu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.

Fungsinya:

- Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kasubid Pemerintahan, antara lain:

PERJANJIAN KINERJA SUBBIDANG PEMERINTAHAN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen
2	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	1 Dokumen
4	Tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan	2 Dokumen

SUB KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	14.824.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	176.174.250
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	25.000.000
Jumlah Total		Rp	215.998.250

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus dipenuhi oleh Sub Bidang Pemerintahan pada Tri Bulan III tahun 2021

2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan

Tribulan III Tahun 2021

NO.	SASARAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
2	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
3	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen monitoring dan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun			
4	Tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

Cost per outcome Sub Bidang Pemerintahan Tribulan III Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisien
				Pagu Anggaran Setelah Refocusing (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.824.000	8.120.000	54,78%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	176.174.250	23.881.500	13,56%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	

			Bidang Pemerintahan							
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	
	TOTAL			215.998.250	32.001.500	18,16%	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Pemerintahan telah terlaksana dengan baik di tribulan III, dimana pada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pada sub kegiatan ini terdapat 4 dokumen yang direncanakan yaitu terkait dokumen terkait desa, renja, renstra dan draft RPJMD sesuai rumpun sub bidang pemerintahan dan yang baru terealisasi adalah dokumen/laporan terkait perencanaan desa dimana telah diadakan pertemuan dengan kecamatan-kecamatan untuk mengevaluasi perencanaan desa tahun sebelumnya. Untuk penganggaran dari pagu Rp. 42.918.960,- mengalami penurunan yang diakibatkan refokusi untuk covid 19 sehingga pagu menjadi Rp. 14.824.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.120.000,- atau 54,78% dan terkait kinerja telah terelasisasi sebesar 75% dari 4 dokumen yang ditargetkan telah terealisasi 3 dokumen.

- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Pada sub kegiatan ini terdapat 1 dokumen yang direncanakan yaitu Dokumen

terkait Kajian Sejarah Lumajang II sebagai kelanjutan kajian sejarah lumajang yang baru terselesaikan termin ke satu pada tahun 2020 dan dilanjutkan pada 2021 untuk termin kedua dikarenakan pada 2020 terkena refocusing anggaran. Untuk penganggaran dari pagu Rp. 292.806.310,- mengalami penurunan yang diakibatkan refokusi untuk covid 19 sehingga pagu menjadi Rp. 176.174.250,- telah terealisasi sebesar Rp.23.881.500,- atau 13,56% dan terkait kinerja masih 0% dari target 1 dokumen yang ditargetkan belum terealisasi dikarenakan 1 dokumen adalah dokumen terkait Kajian Sejarah Lumajang yang masih proses pengerjaan.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Pada sub kegiatan ini terdapat 1 dokumen yang direncanakan yaitu Dokumen terkait Hasil monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun pada subbid pemerintahan. Untuk penganggaran dari pagu Rp 11.458.700,- mengalami kenaikan menjadi Rp. 25.000.000,- dan belum terealisasi dan terkait kinerja masih 0% dari target 1 dokumen yang ditargetkan belum terealisasi dikarenakan 1 dokumen hasil monitoring dan evaluasi pada akhir .

d. Sasaran yang tidak ada anggaran yaitu tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan dengan indikator Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan dari 1 (satu) dokumen sudah terealisasi terkait program kerja subbidang pemerintahan dan untuk sasaran tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan terealisasi 1 (satu) dokumen dari target 2 dokumen.

Secara Keseluruhan pelaksanaan aktifitas pada sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai time schedule, belum terealisasi seluruhnya dikarenakan masih pada proses tribulan III dan akan diselesaikan pada tribulan berikutnya. Capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 66,67% atau 4 dokumen dari target 6 dokumen dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 32.001.500,- dari Rp. 215.998.250,- atau 18,16%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas Sub Bidang Pemerintahan untuk menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Refocusing yang sedang berlangsung membuat anggaran akan minimalis dengan adanya Pandemi Covid akan tetapi kinerja harus tetap dilakukan Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Pemerintahan secara maksimal.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pemerintahan pada tri bulan III Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pemerintahan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkungannya.
2. Sasaran yang tidak memiliki anggaran ada 2 (dua) dimana satu sasaran telah terlaksana kinerjanya dan satu sasaran masih berproses untuk tribulan selanjutnya
3. Capaian kinerja pada tribulan III yang terdapat anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 66,67% atau 4 dokumen dari target 6 dokumen dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 32.001.500,- dari Rp. 215.998.250,- atau 18,16%

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,

KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST.
NIP. 19850331 200903 1 004

KASUBID
PEMERINTAHAN,



TRI CAHYO AGUNG PRASETYO
NIP. 19850617 201001 1 022

LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia.

Tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia adalah membantu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan Manusia,.Diman tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana berikut:

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
- mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
- menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan lingkup pembangunan manusia;

- mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
- mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain lingkup pembangunan manusia;
- melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
- menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia, antara lain:

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	3 Dokumen
		Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Dokumen

Kegiatan/ Sub. Kegiatan		Anggaran
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 21,050,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 51,104,850
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0
Jumlah Total		Rp 72,154,850

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus dipenuhi oleh Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Tri Bulan III Tahun 2021.

2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang SDM Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia TriBulan III Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	0
4	Tersusunnya Program Kerja Sub Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

**2.2 Cost per outcome Sub Bidang SDM Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappeda
Tri Bulan III Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisien
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Manusia		72,154,850	22,154,900	30,7%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21,050,000	21.050.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	51,104,850	1.104.900	2,16 %	100 %	100 %	100 %	4629 %
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	0%	0%	0%	0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia telah terlaksana dengan baik di tribulan III. Pada pelaksanaan kegiatan, capaian realisasi anggaran sebesar 30,7% atau sebesar Rp. 22.154.900,- dan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dari sub kegiatan yang dijadwalkan di Tribulan III.

Dari capaian realisasi anggaran dan kinerja tercapai efisiensi sebesar 100 % dimana pada Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada pelaksanaannya masih

pada tahap awal belum sampai akhir proses tetapi sudah dihasilkan dokumen dalam bentuk laporan sehingga capaian kinerja menjadi tinggi yaitu 100 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia untuk menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Pembangunan Manusia secara maksimal.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Tri Bulan III Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pembangunan Manusia sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkungannya.
2. Realisasi anggaran triBulan III sebesar 30,7 % dari target 75 %. Capaian efisiensi kinerja sebesar 100 % terjadi karena Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia terdapat perubahan anggaran dan belum dapat dilakukan proses penyerapan anggaran sehingga pada pelaksanaannya masih pada tahap awal belum sampai akhir proses tetapi sudah dihasilkan dokumen dalam bentuk laporan sehingga capaian kinerja menjadi tinggi yaitu 100 %.

Lumajang, Oktober 2021

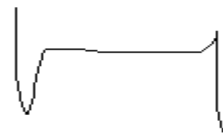
Mengetahui,

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST.
NIP. 19850331 200903 1 004

KASUBID PEMBANGUNAN MANUSIA,



FELLICIA FAUSTINA, S.KM.
NIP. 19860213 201001 2 025

**LAPORAN KINERJA
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2021** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang **Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang **Nomor 77 Tahun 2020, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- d. Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten /Kota bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- g. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan adalah dengan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yaitu terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA.

Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	85 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	85 %

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	345.080.430,-
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	83.710.000,-
	Jumlah Total	428.790.430,-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan **Tribulan III Tahun 2021** :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan Tribulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	85 %	44,44 %	52,28 %
Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan	85 %	16,67 %	19,61 %

	Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD			
--	---------------------------------------	--	--	--

Tabel 2.2

Cost per outcome Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tri Bulan III, Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	345.080.430	103.942.559	30,12 %	85 %	44,44 %	52,28 %	22,16 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	83.710.000	35.600.000	42,52 %	85 %	16,67 %	19,61 %	- 22,91 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Tabel capaian kinerja pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW III Tahun 2021 untuk bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah 52,28 % dengan capaian anggaran sebesar 30,12 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 22,16 %. Sedangkan keterserapan anggaran Berdasarkan tabel di atas untuk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar Rp. 103.942.559,- dari total anggaran Rp. 345.080.430,-. Sedangkan untuk bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, di TW III Tahun 2021 adalah 19,61 % dengan capaian anggaran sebesar 42,52 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar - 22,91 % dan untuk realisasi anggaran berdasarkan tabel yang telah direalisasi sebesar Rp. 35.600.000,- dari total anggaran Rp. 83.71.000,-.

Berdasarkan data di atas untuk tingkat efisiensi tidak tergolong dalam batas efisien (Batasan efisien secara anggaran adalah kurang dari -20 % sampai dengan 20%). Adanya kendala dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan kegiatan tersebut disebabkan pengaruh pandemi Covid-19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat berjalan optimal. Selain itu beberapa kegiatan IPDMIP belum terlaksana

karena adanya beberapa kendala dan pelaksanaan menunggu persetujuan pusat, sehingga penyerapan anggaran belum dapat maksimal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan TW III Tahun 2021 masih banyak beberapa kegiatan yang belum terealisasi namun akan tetap dikerjakan pada TW berikutnya sesuai dengan time schedule yang telah dibuat. Selain itu dengan adanya *refocussing* anggaran maka diperlukan penyesuaian target indikator kinerja menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga dapat tepat sasaran, efektif dan efisien. Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara terus menerus dan berkelanjutan akan tetap memfasilitasi terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

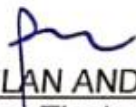
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 Program dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, dimana target tersebut belum berhasil diwujudkan dengan optimal pada tribulan III, namun akan tetap dilaksanakan pada TW selanjutnya.

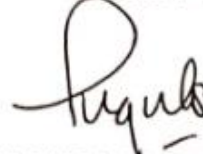
Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670325 199312 2 001

Kabid PSIK



PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT
Penata
NIP. 19780508 200903 1 005

LAPORAN KINERJA SUBID PEREKONOMIAN DAN EKONOMI KREATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kasubid Perekonomian dan Ekonomi Kreatif terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kasubid Perekonomian dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Perekonomian dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian dan ekraf;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- d. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- i. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian dan ekonomi kreatif;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Kasubid perekonomian dan ekonomi kreatif yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja dengan uraian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA KASUBID PEREKONOMIAN DAN EKONOMI KREATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 Dokumen
2	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen
3	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen
4	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 16.390.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp. 26.100.000

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 4.370.000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 3.540.000
	Jumlah	Rp. 50.400.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 TRI BULAN III :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja TRI BULAN III Kasubid Perekonomian dan Ekonomi Kreatif tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	3 Dokumen	1	33,3 %	
2	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen	0	0 %	
3	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen	0	0 %	
4	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Dokumen	0	0 %	
			6 Dokumen	1 Dok	16,67 %	

2.2. Cost per outcome Tri Bulan III, Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Rp. 16.390.000	Rp. 11.160.000	68,09%	3	1	33.3%	-0.96%
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Rp. 26.100.000	Rp. 14.400.000	55,17 %	1	0	0%	0
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang disusun	Rp. 4.370.000	Rp. 1.640.000	37,53 %	1	0	0%	0
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Rp. 3.540.000	Rp. 1.290.000	36.44 %	1	0	0 %	0
Jumlah			Rp. 50.400.000	Rp. 28.490.000	56,53%	6	1	16,67%	-39,86

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan tabel capaian kinerja, secara umum pelaksanaan sub bidang perekonomian dan ekonomi kreatif sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja belum terlaksana secara optimal. Capaian kinerja sampai dengan Tribulan III tahun 2021 sebesar 56,53% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.490.000. Realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut terdapat pada Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ,Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Terdapat kendala dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran terutama dengan adanya pandemi Covid-19, karena adanya penerapan PPKM di Kabupaten Lumajang dan penerapan *Work From Home* (WFH).

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dengan belum maksimalnya pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Sub Bidang Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Pada triwulan III tahun 2021 maka evaluasi dan koordinasi internal perlu ditingkatkan kembali untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dengan adanya *refocusing* anggaran maka diperlukan penyesuaian target indikator kinerja menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga dapat tepat sasaran, efektif dan efisien.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

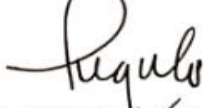
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subid Perekonomian dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 4 (empat) Sasaran Sub Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja, dimana target tersebut belum 100 % berhasil diwujudkan dengan optimal pada Tri Bulan III, sehingga kinerja perlu ditingkatkan dan target indikator kinerja yang belum tercapai akan dilaksanakan pada Tribulan IV.

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
KEPALA BIDANG
PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA
ALAM, INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN



PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT
NIP. 19780508 200903 1 005

KASUBID
PEREKONOMIAN DAN EKONOMI
KREATIF



DYANE SACCHARI, SE. Par
NIP. 19821014 201001 2 027

LAPORAN KINERJA
SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEWILAYAHAN
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pertanggung jawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan, bahwa tugas Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan adalah membantu Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
2. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
3. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
4. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
5. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkupsarana prasarana dan kewilayahan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
7. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;

8. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
9. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sarana prasarana dan kewilayahan;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Kasubbid Sarana Prasarana dan Kewilayahan, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEWILAYAHAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	3 Dokumen
2	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	1 Dokumen
3	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang disusun	1 Dokumen

4	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	3 Dokumen
5	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan yang disusun	1 Dokumen

SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp 235.375.430
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp 40.765.000
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp 9.450.000
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp 51.660.000
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Rp 7.830.000
Jumlah Total		Rp 345.080.430

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran sub kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Tri Bulan III tahun 2021

Tabel 2.1
Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
Tribulan Ke III Tahun 2021

NO.	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	2 Dokumen	66,7%

	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang disusun			
2	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0
4	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	33,3%
5	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0

Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan Tri Bulan III, Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	235.357.430	54.145.000	23 %	3	2	66,67 %	43,67%
2	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	40.765.000	13.902.559	34,10 %	1	1	100%	65,9%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang disusun	9.450.000	1.050.000	11,11%	1	0	0	-11,11%
4	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	51.660.000	33.105.000	64,08%	3	1	33,33%	-30,75%

	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan yang disusun	7.830.000	1.740.000	22,22%	1	0	0	-22,22 %
	JUMLAH		345.080.430	103.942.559	30,12%	9	4	44,44%	14,32%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan terbagi menjadi lima Sub Kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja, secara umum pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja belum terlaksana secara optimal

Secara umum capaian kinerja Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Tribulan III tahun 2021 sebesar 44,4% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

103.942.559 (30,12%) sehingga dapat diketahui efisiensi anggaran sebesar 14,32% artinya dari anggaran yang tersedia dan yang telah dikerjakan oleh Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan sudah efisien.

Terdapat kendala terhadap pencapaian target kinerja dan penyerapan kegiatan tersebut terutama dengan adanya *refocusing* anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang termasuk pada Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan. *Refocusing* Anggaran tersebut mengakibatkan berkurangnya anggaran Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan sehingga rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan target kinerja tidak dapat terpenuhi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dengan pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Pada tribulan III tahun 2021 maka evaluasi dan koordinasi internal perlu ditingkatkan kembali untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan yang belum terealisasi pada tribulan III akan kami kerjakan pada tribulan berikutnya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi di teliti ulang
- Capaian di teliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan Tribulan III Tahun 2021 kami susun dan dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan perlu ditingkatkan agar target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran tribulan berikutnya dapat tercapai. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami diperlukan.

Lumajang, Oktober 2021

KEPALA BIDANG
PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN,



PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT

NIP. 19780508 200903 1 005

KASUBBID
SARANA, PRASARANA DAN KEWILAYAHAN,



ISNAYNI AISYIAH NUR HAQIQI, S.STP

NIP. 19931002 201507 2 001

**LAPORAN KINERJA
SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2021** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang **Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang **Nomor 77 Tahun 2020**, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSIK) Bappeda dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan di bidang PSIK khususnya di sub bidang SDA & LH. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- g. Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
- i. Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Kasubid sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah dengan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja, 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis yaitu tersusunnya dokumen koordinasi, dokumen asistensi, dokumen monitoring dan evaluasi serta dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA.

Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen
2	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 dokumen
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 dokumen

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.260.000,-
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.700.000,-
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.850.000,-
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.500.000,-
Jumlah Total		33.310.000,-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan **Tribulan III Tahun 2021**:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sampai dengan Tribulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	1	33%
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1	0	0 %
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1	0	0%
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1	0	0%
JUMLAH		6	1	16,67 %

Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) Tri Bulan III, Tahun 2021

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	16.260.000	5.580.000	34,32%	3	1	33,3 %	-0,98 %

	RKPD)	RKPD)							
2	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	6.700.000	300.000	4,48%	1	0	0	0
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	8.850.000	930.000	10,51%	1	0	0	0
4	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1.500.000	300.000	20,00%	1	0	0	0
Jumlah			33.310.000	7.110.000	21,34%	6	1	16,67 %	-4,68%

Berdasarkan Tabel 2.2 capaian kinerja pada Subid SDA dan LH di TW III Tahun 2021 adalah **16,67 %**, dengan capaian anggaran **21,34 %** sehingga dapat kita ketahui tingkat efisiensi secara anggaran adalah **-4,68 %**, artinya dari anggaran yang tersedia dan apa yang sudah dilakukan/dikerjakan oleh Subid SDA dan LH sudah **efisien** (Batasan efisien secara anggaran adalah kurang dari -20 % sampai dengan 20 %). Anggaran yang belum terealisasi, akan direalisasikan pada TW berikutnya sesuai dengan time schedule yang sudah direncanakan.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana telah tertulis dan dalam perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani telah dilaksanakan. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi akan terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2021, capaian kinerja Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tercapai 16,67%. Dari 4 (empat) kegiatan yang ada pada Subbid SDA dan LH baru terealisasi 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan rincian realisasi dokumen sebanyak 1 dokumen dari target 3 dokumen. Adapun capaian

pelaksanaan kinerja meliputi Jumlah dokumen koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sampai dengan TW III Tahun 2021 yaitu sebesar 16, 67%, kegiatan yang belum terealisasi pada TW III akan kami kerjakan pada TW berikutnya.

Dimasa Pandemi covid 19 Subid SDA dan LH secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan fasilitasi dan koordinasi kepada lingkup pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup secara online dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Timeschedule yang telah direncanakan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Capaian kinerja Subid SDA dan LH pada TW III sebesar 16,67 % dengan capaian anggaran sebesar 21,34%. Dari capaian kinerja dan capaian anggaran pada Subid SDA dan LH dapat dikatakan efisien secara anggaran yaitu sebesar -4,68%. Kondisi PPKM sangat berpengaruh pada seluruh aktivitas kegiatan SDA dan LH sehingga secara anggaran tidak ada penyerapan,
3. Pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari **1 Program** dengan **4 (empat)** kegiatan, **4 (empat)** Sasaran dan **4 (empat)** Indikator Kinerja yang ditetapkan, dimana target tersebut belum 100 % **berhasil diwujudkan** dengan optimal akan dikerjakan pada TW berikutnya sesuai dengan time schedule
4. Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid 19 Subid SDA dan LH akan selalu aktif berkoordinasi secara online pada Organisasi Perangkat Daerah terutama lingkup Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Lingkungan Hidup.

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
Kepala Bidang PSIK



PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT
Penata
NIP. 19780508 200903 1 005

Kasubid Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup



FIDYANA RIZKA, SP
Penata
NIP. 19790510 200903 2 006

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan bidang dengan tujuan agar masing-masing unit OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasannya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Evaluasi terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Data dan Informasi;**
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;**
- c. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.**

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dengan Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan serta Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dengan terdapat target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
2	Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
3	Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	427.299.825
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	135.252.600
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	128.662.875
Jumlah		Rp	691.215.300

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Data dan Evaluasi, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tribulan II tahun 2021.

Tabel 2
Realisasi Program Kegiatan Bidang Data dan Evaluasi Sampai Tribulan III
Tahun 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	50%	50%
2	Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	50%	50%
3	Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	50%	50%

1.2. Cost per outcome Bidang Data dan Evaluasi Bappeda TriBulan II, Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	427.299.825	209.834.800	45,9%	100%	50%	50%	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.252.600	22.150.000	28,86%	100%	50%	50%	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.662.287	13.350.000	2,5%	100%	50%	50%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Evaluasi Bappedasudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sedangkan koordinasidengan instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pagu anggaran Bidang Data dan Evaluasi menjadi berkurang, dan indikator capaian hanya berubah di beberapa program saja, sedangkan proses perencanaan dan hasil dari proses perencanaan tersebut harus tersedia. Untuk program Penelitian dan Pengembangan Wilayah tidak dilaksanakan karena terkena pandemi covid-19

Terkait kegiatan, sampai pada tribuan ke 4 tahun 2020, capaian target kinerja keuangan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam time schedule kegiatan. Hal dapat dilihat dari penyelesaian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasisecara fisik sudah dalam tahap penyelesaian/penyempurnaan. Diharapkan kinerja keuangan akan dapat segera terealisasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adanya refocusing anggaran dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, yang mengharuskan penyesuaian anggaran menyebabkan anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mengalami pengurangan. Dengan sisa anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

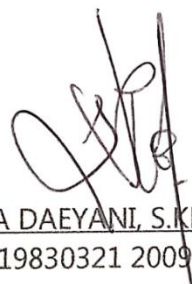
1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah di laksanakan dengan baik;
2. Walau ada refocusing anggaran karena pandemi Covic-19, Pencapaian sasaran kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja tetapi target kinerja keuangan belum sesuai target karena ada beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi. Dalam tahun 2021 kedepan akan dilakukan upaya-upaya koordinasi yang lebih baik lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.

Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG

Pt. KABID DATA DAN EVALUASI
BAPPEDA KAB. LUMAJANG


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


RIESA DAEYANI, S.KM., M.PH
NIP. 19830321 200903 2 006

LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan, bahwa tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
3. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

8. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 kali
2	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah laporan Evaluasi SPM	4 rakor 4 dokumen 1 dokumen

SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp.28.897.500
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 99.765.375
Jumlah Total		Rp 128.662.875

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran Sub kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Tri Bulan III tahun 2021

Tabel 2.1
Realisasi Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Triwulan Ke II Tahun 2021

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 kali	0	
2	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitas Penyusunan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 rakor	1 rakor	
		Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 dokumen	0	
		Jumlah laporan Evaluasi SPM	1 dokumen	1 dokumen	

2.2 *Cost per outcome* Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Triwulan III
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Anggaran			Kinerja			efisien
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Koordinasi pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota	21.600.000	16.200.000	37%	4 kali	0	0	0
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan daerah	7.950.000	2.550.000	32 %	4 rakor 4 dokumen 1 dokumen	1 rakor - 1 dokumen	22%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sub Kegiatan Koordinasi pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Daerah. Berdasarkan tabel capaian kinerja, secara umum pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota dan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sub kegiatan Koordinasi pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota

memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan Capaian kinerja sebesar 0 %. Namun pada realisasi anggaran terdapat penyerapan anggaran mencapai 37 % dari total pagu yang dianggarkan. Adanya realisasi anggaran tanpa diikuti dengan capaian kinerja disebabkan karena penyerapan anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk pemenuhan honorarium tenaga kontrak(PTT). Capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dengan total capaian kinerja sebesar 22 %. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 32 %. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini juga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala terhadap rendahnya pencapaian target kinerja dan penyerapan kegiatan tersebut terutama dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang termasuk pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan untuk penanganan Pandemi Covid 19. *Refocusing* Anggaran tersebut mengakibatkan berkurangnya anggaran Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sehingga rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan target kinerja tidak dapat terpenuhi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dengan masih rendahnya pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Daerah Pada triwulan III tahun 2021 maka evaluasi dan koordinasi internal perlu ditingkatkan kembali untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Penyesuaian target indikator kinerja berdasarkan anggaran telah dilakukan untuk selanjutnya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target kinerja.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Triwulan III Tahun 2021 kami susun dan dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan perlu ditingkatkan agar target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran triwulan berikutnya dapat tercapai. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami diperlukan.

Lumajang, 08 Juli 2021

Mengetahui,

**KEPALA BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**



RIESA DAEYANI, S.KM., M.PH
NIP. 19830321 200903 2 006

**KASUBBID
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN,**



HOSISA TATA HASANAH, S.Sos.I
NIP. 19840211201101 2 011

**LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
BIDANG DATA DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Data dan Evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Tugas Sub Bidang Data dan Informasi adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

- Membantu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi ;
- Membantu melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah ;
- Membantu mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- Membantu mengelola hasil analisa atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Membantu menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- Membantu menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
- Membantu mengkoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Membantu mengelola data dan Informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi
- Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kasubid Data dan Informasi, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Informasi Pembangunan daerah	3 Dokumen	
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 fasilitasi 1 aplikasi	
3	Terwujudnya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	

	KEGIATAN	ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 105.394.575	Rp. 11.800.000
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 29.858.025	Rp. 21.600.000
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.198.175	Rp. 0
		Rp. 162.450.77	Rp. 33.400.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub Bidang Data dan Informasi pada Tri Bulan III tahun 2021.

Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Sampai Tribulan Ke III Tahun 2021

NO.	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Fasilitas dan Informasi Pembangunan daerah	3 Dokumen	3 dokumen	100%
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Fasilitas pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 fasilitas 1 aplikasi	1 fasilitas 1 aplikasi,	100 %
3	Terwujudnya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	-	0 %

2.2 Cost per outcome Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Tri Bulan III, Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Anggaran			Kinerja			efisien
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.800.000	11.350.000	96,15 %	3 Dokumen	3 dokumen	100 %	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	21.600.000	16.200.000	75 %	1 aplikasi 1 fasilitas	1 aplikasi, 1 fasilitas	75%	

		Perencanaan Pembangunan SKPD							
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	1 Dokumen	-	0 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Data dan Informasi telah terlaksana semua dengan baik di tribulan III.

Adanya kondisi pandemi Covid-19, yang mengharuskan daerah melakukan refocusing anggaran dan beberapa penyesuain target capaian sub kegiatan. Dengan sisa anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

Secara garis besar dokumen BPS sudah ada dan sudah ada dalam bentuk pdf, untuk koordinasi forum satu data akan dilaksanakan di tribulan terakhir. Untuk pemanfaatan SIPD dalam proses perencanaan penyusunan RKPD Tahun 2022 dan RKPD-P Tahun 2021 telah dilalsanakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Fungsi dan tugas Sub bidang Data dan Informasi untuk menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan yang di buat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Untuk mengakomodir data terkait perencanaan juga perlu ditingkatkan agar dapat mendukung prose perencanaan secara maksimal.

Dalam masa pandemi covid-19, Sub Bidang Data dan Informasi tetap berupaya memaksimalkan capaian dan realisasi anggaran dan target kinerja secara maksimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :


1. Sub bidang Data dan Informasi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkungnya.
2. Terkait target di tribulan terakhir tahun 2021, sub bidang Data dan Informasi akan berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan dan menuntaskan kegiatan yang belum terselesaikan di tribulan sebelumnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

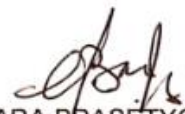
Lumajang, Oktober 2021

Mengetahui,

KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

KASUBID DATA DAN INFORMASI,


RIESA DAEYANI, S.KM., M.PH
NIP. 19830321 200903 2 006


EBARA PRASETYO B.S., S. Si ⁱ
NIP. 19810524 201001 1 015

LAPORAN KINERJA
PEJABAT SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pada bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri bulan III Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan adalah membantu Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.

Tugasnya:

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
- melaksanakan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan, antara lain:

PERJANJIAN KINERJA
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok
2	Terwujudnya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas
3	Terwujudnya Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas
4	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 fas
5	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas
6	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 fas
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING (Rp)
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3.600.000
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28.800.000
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.750.000
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3.000.000
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	242.923.675
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.515.560
	Jumlah	459.589.235

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus dipenuhi oleh Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Tri bulan III tahun 2021

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Tribulan III Tahun 2021

NO	SASARAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1 dok	1 dok	100%
2	Terwujudnya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	2 fas	2 fas	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah fasilitasi konsultasi publik	2 fas	2 fas	100%

NO	SASARAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 fas	1 fas	100%
5	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	2 fas	2 fas	100%
6	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 fas	2 fas	100%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dok	2 fas	75%

**Cost per outcome Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Tribulan IV Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisien
				Pagu Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3.600.000	3.600.000	100	1 dok	1 dok	100%	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28.800.000	0	0	2 fas	2 fas	100%	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.750.000	16.550.000	98,1	2 fas	2 fas	100%	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3.000.000	3.000.000	100	1 fas	1 fas	100%	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisien
				Pagu Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	242.923.675	236.361.600	97,30	2 fas	2 fas	100%	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.515.560	154.515.590	93,92	5 fas	4 fas	75%	
TOTAL				459.589.235	414.027.190	81,55			95,83	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan telah terlaksana dengan baik di tribulan I, dimana pada 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, realisasi anggaran sebesar 100% maupun capaian kinerja berupa 1 dokumen sebesar 100% pada tribulan III tahun 2021 ini;
- b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, belum terdapat realisasi anggaran tetapi terdapat capaian kinerja berupa 2 fasilitasi sebesar 100% pada tribulan IV tahun 2021 ini;
- c. Pelaksanaan Konsultasi Publik, telah dilaksanakan sebanyak 2 fasilitasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98%;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja berupa 1 fasilitasi sebesar 100%;

- e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota juga telah selesai dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai 97% disertai dengan capaian kinerja sebanyak 2 fasilitasi sebesar 100%; dan
- f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sudah terealisasi terdapat realisasi anggaran sebesar 93,92% dan capaian kinerja sebanyak 4 fasilitas sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan untuk menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Perencanaan dan Pendanaan secara maksimal.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pemerintahan pada tri bulan III Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkungannya.
2. Capaian kinerja pada tri bulan III yang terdapat anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 95,83% dengan realisasi anggaran sebesar 81,55%

Lumajang, 5 September 2021

Mengetahui,

Plt. KEPALA BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



RIESA DAEYANI, S.KM., M.PH
NIP. 19830321 200903 2 006

KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PENDANAAN



RIESA DAEYANI, S.KM., M.PH
NIP. 19830321 200903 2 006